



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat: Jalan Pahlawan, Nomor 1, Singaraja, Bali

P E N G U M U M A N

NOMOR : 800.1.13/5276/VIII/BKPSDM/2024

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 293 Tahun 2024, Tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 dan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024, Tanggal 13 Agustus 2024, Hal : Jadwal Seleksi Pengadaan PNS TA 2024, Pemerintah Kabupaten Buleleng memperoleh penetapan kebutuhan PNS Jabatan Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024 sebanyak **145**. Dengan ini diumumkan persyaratan dan ketentuan pendaftaran Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan ditugaskan pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan ketentuan sebagai berikut :

I. KEBUTUHAN JABATAN

Kebutuhan Jabatan yang lowong pada seleksi PNS terdiri atas :

1. Tenaga Teknis : 138
2. Tenaga Kesehatan : 7

Dengan rincian formasi sebagaimana terlampir dalam **Lampiran I** Pengumuman ini.

II. SYARAT PENDAFTARAN

A. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia;
2. Ketentuan usia pelamar paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) pada saat melamar;
3. Ketentuan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat

- melamar bagi pelamar untuk jabatan dokter dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis;
4. Bagi pelamar jabatan fungsional tenaga kesehatan untuk kualifikasi pendidikan dan syarat jabatan merujuk pada **surat edaran direktur jenderal tenaga kesehatan kementerian kesehatan nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang persyaratan kualifikasi pendidikan dan surat tanda registrasi dalam rangka pengadaan calon aparatur sipil negara jabatan fungsional kesehatan tahun 2024;**
 5. Terkait persyaratan STR (Surat Tanda Registrasi) untuk melamar jabatan fungsional kesehatan merujuk pada **KEPMENPAN RB NO 322 Tahun 2024 tentang persyaratan surat tanda registrasi untuk melamar pada jabatan fungsional kesehatan dalam pengadaan aparatur sipil negara tahun anggaran 2024;**
 6. Bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
 7. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 8. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 9. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 10. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 11. Tidak mengajukan permohonan pindah tempat tugas dalam kurun waktu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 12. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 13. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;

14. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah;
15. Berkelakuan baik;
16. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya.

B. Persyaratan Khusus

1. Berdasarkan KEPMENPAN RB NO 320 Tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024 untuk kebutuhan khusus penyandang disabilitas paling sedikit 2% (dua persen) dari total alokasi kebutuhan PNS yang ditetapkan oleh menteri. Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada kebutuhan umum selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Pelamar wajib memiliki ijazah dengan kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan yang dilamar;
 - b) Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas dibuktikan dengan:
 - 1) Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
 - 2) Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas/tugas sesuai dengan jabatan yang akan dilamar.
2. Khusus PPPK Kabupaten Buleleng yang akan melamar kebutuhan PNS **wajib memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar dan memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun terhitung mulai sesuai SK PPPK**, serta mengajukan permohonan persetujuan kepada Penjabat Bupati Buleleng cq. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (format sesuai dalam **lampiran V**). Batas waktu pengajuan permohonan persetujuan paling lambat **31 Agustus 2024** di Kantor Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia;
3. Pelamar seleksi pengadaan PNS di Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib memenuhi persyaratan diantaranya:
 - a. Pelamar dengan kualifikasi pendidikan D-IV/S-1 wajib memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal **3,00**;

- b. Pelamar dengan kualifikasi pendidikan SMA sederajat/SMK wajib memiliki Nilai Rata-rata pada daftar nilai Ijazah minimal **75**;
- 4. Pelamar dengan jabatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) wajib memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 diantaranya:
 - a. Jabatan Satuan Polisi Pamong Praja Pemula wajib memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani dengan tinggi badan paling kurang 160 sentimeter untuk laki-laki dan 155 sentimeter untuk perempuan;
 - b. Jabatan Satuan Polisi Pamong Praja Ahli Pertama wajib memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani dengan tinggi badan paling kurang 160 sentimeter untuk laki-laki dan 155 sentimeter untuk perempuan;

III. TATA CARA PENDAFTARAN

Pelamaran seleksi pengadaan PNS dilakukan secara daring melalui laman SSCASN <https://sscasn.bkn.go.id> dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik dengan tata cara sebagai berikut :

1. Pembuatan akun pendaftaran seleksi pengadaan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL;
2. Pelamar agar cermat dan teliti dalam mengisikan data pada sistem pembuatan akun pendaftaran;
3. Setelah pembuatan akun, pelamar login kembali untuk melakukan pemilihan jabatan yang dilamar dan melengkapi dokumen persyaratan pendaftaran pada SSCASN;
4. Setiap dokumen persyaratan **WAJIB DOKUMEN ASLI**, dipindai (scan) **BERWARNA DAN TERBACA DENGAN JELAS**;
5. Berkas pendaftaran diajukan oleh pelamar dengan mengunggah (upload) berkas pendaftaran di portal <https://sscasn.bkn.go.id> pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Persyaratan Wajib :
 - 1) Scan Asli Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);

- 2) Pasfoto **terbaru** Pakaian Formal dengan latar belakang merah. Bagi pelamar yang memakai **hijab** wajib menggunakan Hijab berwarna **Hitam**;
- 3) Scan Asli Ijazah dan Transkrip Nilai bagi lulusan perguruan tinggi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan. Bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki **Ijazah dan Indeks Prestasi Kumulatif** yang **telah disetarakan** oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
- 4) Scan Asli Ijazah dan Transkrip/Daftar Nilai asli Sekolah Menengah Atas/Sederajat bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat yang terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi dan/atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama;
- 5) Sertifikat atau Tangkapan Layar (Screenshot) pada PDDIKTI / BAN-PT dari Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
- 6) Scan Asli Surat lamaran yang sudah ditandatangani dan dibubuhkan e-meterai 10.000 (format sesuai dalam **lampiran II**);
- 7) Scan Asli Surat Pernyataan 5 (lima) Poin yang sudah ditandatangani dan dibubuhkan e-meterai 10.000 (format sesuai dalam **lampiran III**);
- 8) Scan Asli Surat Pernyataan tidak pindah selama 10 tahun yang sudah ditandatangani dan dibubuhkan e-meterai 10.000 (format sesuai dalam **lampiran IV**);
- 9) Scan Asli Surat Tanda Registrasi (STR) bagi Tenaga Kesehatan yang masih berlaku;
- 10) Seluruh dokumen persyaratan pendaftaran/pelamaran yang diunggah (upload) adalah hasil pemindaian (scan) dokumen yang Asli. Hasil scan dokumen dapat dibaca dengan jelas dan utuh (tidak terpotong) serta berwarna (tidak hitam putih);
- 11) Dokumen pelamaran **wajib** menggunakan meterai elektronik (E-Meterai).

b. Persyaratan Khusus :

- 1). Khusus bagi penyandang disabilitas mengunggah dokumen:
 - a. Surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas, yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami; dan
 - b. link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas/tugas sesuai dengan jabatan yang akan dilamar;
- 2). Link video singkat bagi pelamar disabilitas disampaikan dalam format alamat *Uniform Resource Locator* (URL) dan dapat diakses/dibuka dan diunduh oleh panitia;
- 3). Pelamar agar membaca dengan cermat petunjuk dan keterangan yang tercantum pada menu upload dokumen.

IV. TAHAPAN SELEKSI

A. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi dilakukan dengan mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen persyaratan pendaftaran;

B. Seleksi Kompetensi

1. Peserta Seleksi Kompetensi Dasar adalah pelamar yang lulus seleksi administrasi pada seleksi pengadaan PNS tahun 2024;
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 meliputi:
 - a. tes wawasan kebangsaan (TWK)
 - b. tes intelegensia umum (TIU); dan
 - c. tes karakteristik pribadi (TKP).
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah seleksi lanjutan setelah finalisasi nilai SKD yang bertujuan mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya yang dilaksanakan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT);
4. Nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan PNS untuk Jabatan Fungsional tenaga teknis dan tenaga kesehatan sesuai pada **Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024.**



V. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI PNS TA 2024

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
16	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
24	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

VI. KETENTUAN LAINNYA

1. Pendaftaran selain melalui mekanisme pendaftaran sebagaimana ketentuan cara pendaftaran diatas dinyatakan tidak berlaku dan tidak akan diproses;
2. Pelamar harus membaca dengan cermat persyaratan dan ketentuan dalam pendaftaran pada Seleksi Pengadaan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2024;
3. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta gugur/tidak lulus dan merupakan kelalaian peserta;
4. Pada saat pengisian data diri pelamar, agar dilakukan secara teliti dan telah sesuai dengan data yang dimiliki agar tidak terjadi kesalahan data yang mengakibatkan gugurnya pelamar di tahapan Seleksi Administrasi;
5. Pelamar hanya dapat melamar **pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN yaitu PNS atau PPPK pada tahun anggaran yang sama. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) periode Tahun Anggaran;**
6. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi pengadaan PNS Pemerintah Kabupaten Buleleng, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
7. **Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi/dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan/data pelamar atau pendaftar atau peserta yang tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau berlawanan dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani/tidak benar, maka panitia seleksi menggugurkan kelulusan pelamar/pendaftar/peserta/Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan;**
8. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
9. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat;



10. Apabila Pelamar dalam melakukan pendaftaran online melalui Sistem Seleksi CASN Badan Kepegawaian Negara (<https://sscasn.bkn.go.id>) mengalami kendala agar menyampaikan permasalahan kepada pengelola SSCASN menggunakan layanan “Help Desk” yang tersedia pada SSCASN tersebut;
11. Pengaduan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan seleksi pengadaan PNS di Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 melalui surat elektronik : panselasnbuleleng@gmail.com

VII. LAYANAN INFORMASI

Helpdesk Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi Pengadaan PNS Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 dapat mendatangi Kantor BKPSDM Kabupaten Buleleng pada hari Senin s/d Kamis pukul 08.00 s/d 15.00 WITA, hari Jumat 08.00 s/d 13.00 WITA Telp. 0362 3301891 dan Layanan Konsultasi secara daring melalui “SIJIWA” (via Whatsapps 085175359880), melalui surat elektronik panselasnbuleleng@gmail.com atau dapat dilihat pada situs resmi *website* dan media sosial resmi BKPSDM Kabupaten Buleleng <https://linktr.ee/bkpsdmbuleleng> .

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Singaraja, 19 Agustus 2024
Sekretaris Daerah
Selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah
Pengadaan PNS Kabupaten Buleleng
Tahun 2024



Lampiran I

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI KEBUTUHAN UMUM	ALOKASI KEBUTUHAN KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS
A	TENAGA KESEHATAN		7	0
1	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	1	
2	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIS	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	1	
3	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	1	
4	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	2	
5	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS UROLOGI	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	1	
6	PSIKOLOG KLINIS AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	1	



NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI KEBUTUHAN UMUM	ALOKASI KEBUTUHAN KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS
B	TENAGA TEKNIS			135	3
1	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH; S-1 EKONOMI	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN ORGANISASI	2	
2	ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN AHLI PERTAMA	S-1 KELAUTAN; S-1 PERIKANAN; D-IV PERIKANAN	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERIKANAN	1	
3	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 TEKNIK SIPIL; S-1 MANAJEMEN	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG INSPEKTORAT INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I	4	
4	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 TEKNIK SIPIL; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG INSPEKTORAT INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II	4	
5	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 MANAJEMEN; S-1 HUKUM	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG INSPEKTORAT INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH V	4	
6	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 TEKNIK SIPIL	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG INSPEKTORAT INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV	3	
7	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM; S-1 AKUNTANSI; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 TEKNIK SIPIL	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG INSPEKTORAT INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III	4	
8	AUDITOR TERAMPIL	D-III AKUNTANSI	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG INSPEKTORAT INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III	1	
9	AUDITOR TERAMPIL	D-III AKUNTANSI	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG INSPEKTORAT INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I	1	
10	AUDITOR TERAMPIL	D-III AKUNTANSI	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG INSPEKTORAT INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV	1	
11	AUDITOR TERAMPIL	D-III AKUNTANSI	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG INSPEKTORAT INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II	1	
12	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU INFORMATIKA; S-1 ILMU KOMPUTER	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG KECAMATAN SAWAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN PERENCANAAN	1	
13	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 ILMU KOMPUTER	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG KECAMATAN TEJAKULA SEKRETARIAT SUB. BAGIAN PERENCANAAN	1	
14	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU INFORMATIKA; S-1 ILMU KOMPUTER	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG KECAMATAN SAWAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	1	
15	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG INSPEKTORAT INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH V	6	
16	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG INSPEKTORAT INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III	3	
17	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG INSPEKTORAT INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I	3	



NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI KEBUTUHAN UMUM	ALOKASI KEBUTUHAN KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS
18	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM; S-1 AKUNTANSI; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG INSPEKTORAT INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV	3	
19	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG INSPEKTORAT INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II	3	
20	PENGELOLA KESEHATAN IKAN AHLI PERTAMA	D-IV PERIKANAN; S-1 PERIKANAN	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN BIDANG PRODUKSI PERIKANAN	3	
21	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN BAGIAN HUKUM	1	
22	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK; S-1 MANAJEMEN; S-1 EKONOMI; S-1 PENDIDIKAN JASMANI; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	4	
23	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN; S-1 EKONOMI; S-1 HUKUM; S-1 PENDIDIKAN JASMANI; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH	5	
24	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN; S-1 EKONOMI; S-1 HUKUM; S-1 PENDIDIKAN JASMANI; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG SUMBER DAYA APARATUR	4	
25	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM; S-1 EKONOMI; S-1 MANAJEMEN; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 PENDIDIKAN JASMANI	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4	
26	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	SLTA/SMA SEDERAJAT; SMK	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	11	
27	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	SLTA/SMA SEDERAJAT; SMK	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT	10	
28	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL; S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL; S-1 ILMU KOMUNIKASI; S-1 BAHASA INGGRIS; S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK BIDANG PENGELOLAAN DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	1	
29	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK; S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI; S-1 EKONOMI; S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL; S-1 BAHASA INGGRIS; S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS; S-1 ILMU KOMUNIKASI	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK BIDANG PENGELOLA KOMUNIKASI PUBLIK	1	
30	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA; D-IV TEKNIK INFORMATIKA	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT	1	
31	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 ILMU INFORMATIKA	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS PERHUBUNGAN BIDANG LALU LINTAS SEKSI PERLENGKAPAN JALAN	1	
32	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SEKRETARIAT	1	

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI KEBUTUHAN UMUM	ALOKASI KEBUTUHAN KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS
33	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 ILMU KOMPUTER	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL	1	
34	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA; D-IV TEKNIK INFORMATIKA; S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SEKRETARIAT		1
35	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU INFORMATIKA; D-IV TEKNIK INFORMATIKA; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS PERHUBUNGAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM	1	
36	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU INFORMATIKA; S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS TENAGA KERJA SEKRETARIAT SUB. BAGIAN UMUM & KEUANGAN	2	1
37	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 SISTEM INFORMASI; D-IV TEKNIK INFORMATIKA	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SEKRETARIS SUB BAGIAN UMUM	2	
38	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BIDANG PENGEMBANGAN BUDAYA POLITIK	1	
39	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 SISTEM INFORMASI; D-IV TEKNIK INFORMATIKA	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SEKRETARIAT	1	
40	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK BIDANG INFRASTRUKTUR DAN LAYANAN SPBE	5	
41	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 SISTEM INFORMASI; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI	1	
42	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA; D-IV TEKNIK INFORMATIKA; S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BIDANG PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN	1	
43	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU INFORMATIKA	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	1	
44	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 TEKNIK KOMPUTER	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS LINGKUNGAN HIDUP SEKRETARIAT	2	
45	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA; S-1 ILMU INFORMATIKA; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 TEKNIK KOMPUTER; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG MUTASI DAN PENGHARGAAN	1	

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI KEBUTUHAN UMUM	ALOKASI KEBUTUHAN KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS
46	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU INFORMATIKA; S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SEKRETARIAT	1	
47	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK BIDANG TATA KELOLA DAN SUMBER DAYA MANUSIA SPBE	2	
48	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS KEBUDAYAAN SEKRETARIAT	2	
49	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 ILMU INFORMATIKA; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SEKRETARIAT SUBBAG KEUANGAN	1	
50	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU INFORMATIKA; S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH BIDANG PERINDUSTRIAN	1	
51	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI; D-III TEKNOLOGI INFORMASI	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI	1	
52	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA; D-III TEKNOLOGI INFORMASI	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2	1
53	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA; D-III SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASANA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL	1	
54	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI; D-III TEKNOLOGI INFORMASI; D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK BIDANG TATA KELOLA DAN SUMBER DAYA MANUSIA SPBE	2	
55	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI; D-III TEKNIK INFORMATIKA	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA	1	
56	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA; D-III SISTEM INFORMASI; D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA SEKOLAH DASAR	1	
57	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS KESEHATAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM	2	

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI KEBUTUHAN UMUM	ALOKASI KEBUTUHAN KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS
58	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS; D-III SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH BIDANG SARANA DAN TERTIB NIAGA PERDAGANGAN	1	
59	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI; D-III TEKNIK INFORMATIKA	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SEKRETARIAT	2	
60	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS; D-III SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI	1	
61	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH SEKRETARIAT	1	

LAMPIRAN II CONTOH SURAT LAMARAN (Diketik oleh pelamar)

Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : Permohonan
Pendaftaran Seleksi
Pengadaan Pegawai
Negeri Sipil

Singaraja, (tanggal sesuai saat pendaftaran)
Kepada
Yth. Bapak Penjabat Bupati
Buleleng Cq. Kepala
Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Dengan hormat,

Memperhatikan Pengumuman Nomor 800.1.13/5276/VIII/BKPSDM/2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang Seleksi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Tempat, Tgl. lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan : *(jenjang pendidikan beserta jurusan)*
Alamat :
Nomor HP/Wa :
Alamat e-mail :

Mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat mengikuti seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 dengan jabatan*) unit kerja penempatan... **)

Sebagai bahan pertimbangan, maka bersama ini saya unggah dokumen :

- Pasfoto terbaru berlatar belakang merah
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku/Surat Keterangan
- Ijazah beserta transkrip nilai
- Surat Keterangan Pengalaman kerja
- STR (bagi jabatan yang mewajibkan STR)***
- Surat Keterangan Disabilitas****

Demikian surat permohonan ini disampaikan, besar harapan saya kiranya dapat dipertimbangkan untuk dapat mengikuti seleksi pengadaan PNS Tahun 2024. Terima kasih.

Hormat saya,

e-materai 10.000

(.....)

Keterangan***** :

*) Isikan Nama Jabatan yang dilamar

**) Isikan Unit Kerja Penempatannya sesuai dengan unit kerja pada jabatan yang dilamar

***) dicantumkan bagi yang memiliki, bagi yang tidak memiliki silahkan di hapus

****) Ketika pengajuan dokumen, keterangan beserta uraiannya dihapus



LAMPIRAN III

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, Tgl. Lahir :
NIK :
Pendidikan :
Jabatan yang dilamar :
Jenis Kelamin :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya menerima keputusan Panitia membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi Pengadaan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 dan bersedia dituntut di pengadilan serta menerima segala tindakan Instansi Pemerintah.

.....,2024

Yang Membuat Pernyataan,

e-materai 10.000 ITD

(.....)



LAMPIRAN IV

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pendidikan/Jurusan :
Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa apabila saya diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, saya tidak akan mengajukan permohonan pindah tempat tugas dalam kurun waktu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Singaraja,

Yang membuat pernyataan

TTD

e-materai 10.000

(_____)



LAMPIRAN V

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan Mengikuti Seleksi PNS di Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2024

Kepada :
Yth. Penjabat Bupati Buleleng
Cq. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Bersama surat ini kami sampaikan permohonan persetujuan mengikuti seleksi PNS atas nama :

N a m a :
N I P P P K :
Golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

Demikian surat permohonan persetujuan ini disampaikan, untuk mendapat pertimbangan dan petunjuk lebih lanjut.

....., 2024

Pemohon

Nama
NIPPPK.

Tembusan :

Kepala SKPD tempat PPPK pemohon

